

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 287 juta jiwa pada awal 2026, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar (Worldometer, 2026). Pendapatan nasional menjadi indikator utama untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara, mencerminkan total nilai moneter seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Besarnya pendapatan nasional menunjukkan kemampuan suatu negara dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghadapi guncangan ekonomi global (Erickson et al., 2025).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator penting untuk menilai kontribusi masing-masing daerah terhadap pendapatan nasional. PDRB menggambarkan akumulasi nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu provinsi sesuai harga pasar (BPS, 2025). Pertumbuhan PDRB di kota menengah cenderung lebih tinggi dibandingkan kota kecil atau pedesaan, sehingga dapat dijadikan tolok ukur efektivitas pembangunan daerah sekaligus perannya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (World Bank, 2024).

PDRB adalah indikator penting yang mencerminkan kinerja ekonomi daerah melalui nilai produksi barang dan jasa sesuai harga pasar (BPS, 2021). PDRB di Indonesia pada periode 2020–2024 menunjukkan tren naik, seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi dan transformasi

struktural, ditandai oleh ekspansi sektor industri pengolahan dan jasa (Astawa et al., 2024). Grafik berikut memberikan bukti visual perkembangan PDRB nasional selama periode tersebut.

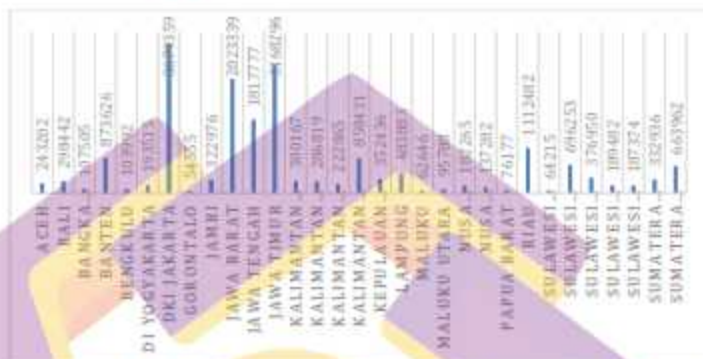


Gambar 1. 1 Grafik PDRB Berlaku 2020 -2024 (Miliar Rp).  
Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1.1 Peningkatan PDRB tersebut mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi yang disertai dengan transformasi struktural, ditandai oleh kembali ekspansinya sektor industri pengolahan dan jasa. Kenaikan PDRB tersebut juga berlangsung seiring dengan meningkatnya tekanan inflasi dalam periode yang sama, sehingga sebagian pertumbuhan nilai output dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa (Zaharani & Nasir., 2025).

PDRB secara nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi dan transformasi struktural di sektor industri pengolahan dan jasa. Namun demikian, pada tingkat provinsi nilai PDRB menunjukkan variasi yang besar antarwilayah. Provinsi dengan nilai PDRB tertinggi pada tahun 2024 adalah DKI Jakarta (BPS, 2024), diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat, sementara provinsi

seperti Papua barat dan Maluku mencatat nilai PDRB terendah. Ketidakmerataan ini ditunjukkan pada Gambar 1.2, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 32 Provinsi 2024.



Gambar 1. 2 Grafik PDRB ADHB Menurut 32 Provinsi 2024 (Miliar Rp).

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.2 menggambarkan perbedaan mencolok dalam PDRB antara provinsi di Indonesia. DKI Jakarta secara konsisten berada di peringkat teratas dengan PDRB sebesar Rp 3.679.359 Miliar pada tahun 2024, disusul oleh Jawa Timur (Rp 3.168. 296 miliar) dan Jawa Barat (Rp 2.823.339 miliar). Pertumbuhan PDRB di provinsi-provinsi ini didorong oleh konsentrasi kegiatan ekonomi di sektor jasa keuangan, perdagangan, serta industri manufaktur yang intensif modal dan teknologi.

DKI Jakarta sebagai pusat bisnis nasional menarik investasi besar, memiliki infrastruktur digital yang unggul, serta akses pembiayaan yang sangat tinggi baik dari bank konvensional maupun fintech (Bank Indonesia, 2024). Sebaliknya, daerah-daerah di bagian timur Indonesia seperti Papua barat dan Maluku mencatat PDRB yang jauh lebih rendah, yang masing-masing hanya

mencapai Rp.76.177 miliar dan Rp 62.646 miliar pada tahun 2024. Rendahnya PDRB di area tersebut diakibatkan oleh kurangnya infrastruktur, rendahnya akses layanan keuangan, terbatasnya akses teknologi digital, dan sedikitnya penyerapan tenaga kerja di sektor produktif (Koswara, 2024).

Pertumbuhan PDRB di beberapa provinsi pada tahun 2020-2021 utamanya disebabkan oleh pengaruh pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan ekonomi, menghalangi mobilitas tenaga kerja, dan menurunkan konsumsi masyarakat (Sasmiharti & Karyati., 2024). Pemulihan yang berlangsung sejak 2022 dipicu oleh kebijakan stimulus fiskal pemerintah, program pembiayaan UMKM seperti KUR, dan percepatan digitalisasi ekonomi yang mendukung transaksi online serta pembayaran digital (Wahyudi et al., 2022). Provinsi-provinsi yang memiliki infrastruktur digital lebih baik dan akses pembiayaan lebih luas mengalami pemulihan yang lebih cepat dibandingkan yang memiliki akses terbatas.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa peningkatan kinerja ekonomi nasional belum sepenuhnya dirasakan secara merata di setiap provinsi. Perbedaan nilai PDRB antarwilayah menggambarkan adanya ketidakseimbangan kemampuan ekonomi daerah. Sebagian provinsi memiliki tingkat pendapatan regional yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Situasi ini memerlukan analisis pada tingkat provinsi agar kebijakan pembangunan dapat disusun secara lebih tepat dan terarah.

Variasi PDRB antar provinsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural ekonomi, tetapi juga oleh perbedaan kesiapan teknologi digital di

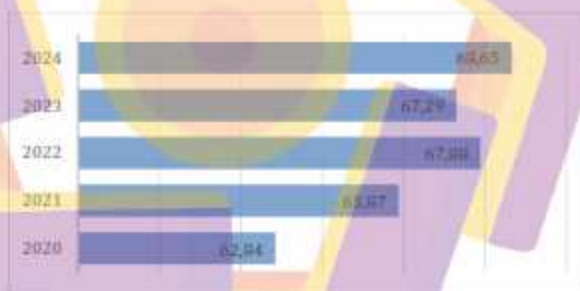
masing-masing daerah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pondasi utama dalam transformasi ekonomi digital di Indonesia (Alfikri & Riofita, 2025). Infrastruktur digital yang memadai memungkinkan layanan keuangan digital beroperasi secara lebih efisien dan menjangkau masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses keuangan (Irrhamni et al., 2025).

Pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi berkontribusi terhadap perluasan transaksi, efisiensi distribusi sumber daya, dan penguatan aktivitas ekonomi regional. Kesiapan teknologi suatu daerah tercermin dari tingkat ketersediaan dan penguasaan teknologi digital di masyarakat (Aliah et al., 2025). Kepemilikan telepon seluler mencerminkan potensi akses masyarakat terhadap layanan digital, seperti *fintech lending*, *mobile banking*, dan pembayaran elektronik serta dinilai lebih merepresentasikan kesiapan ekonomi digital dibandingkan penguasaan internet yang bersifat lebih umum dan tidak seluruhnya mencerminkan aktivitas ekonomi produktif. Pemanfaatan teknologi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan aktivitas ekonomi regional, sehingga berdampak pada PDRB atas dasar harga berlaku (Kusuma et al., 2024).

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa teknologi digital berperan dalam meningkatkan PDRB, meskipun dampaknya tidak selalu seragam. Menurut penelitian Ayunani & Nuraini (2025) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi dan internet berpengaruh positif terhadap PDRB, terutama pada daerah yang didukung oleh kualitas tenaga kerja dan struktur

industri yang memadai. Variasi temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar pada wilayah dengan kapasitas ekonomi yang relatif siap.

Temuan lain menunjukkan bahwa kontribusi teknologi terhadap PDRB tidak bersifat otomatis dan sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur fisik serta kualitas sumber daya manusia, sebagaimana ditunjukkan oleh (Riani & Aji, 2025). Dukungan empiris terhadap temuan-temuan tersebut ditunjukkan melalui grafik kepemilikan dan penguasaan telepon seluler tahun 2020–2024, yang memperlihatkan adanya fluktuasi berupa penurunan pada masa awal pandemi dan peningkatan kembali pada periode pemulihan, mencerminkan dinamika adopsi teknologi digital di tingkat provinsi.



Gambar 1. 3 Grafik Penduduk Yang Memiliki/Menguasai Telepon seluler (persen).

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Persentase penduduk yang memiliki atau menguasai telepon seluler menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2020–2024. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kepemilikan perangkat seluler meningkat dari 63 persen pada tahun 2020 menjadi 68,8 persen pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2025). Peningkatan ini mencerminkan adopsi

teknologi digital yang semakin masif dalam aktivitas ekonomi masyarakat seiring pergeseran pola transaksi menuju layanan berbasis digital. Penetrasi teknologi informasi dan komunikasi yang semakin merata di berbagai wilayah akhirnya membentuk pondasi kuat bagi berkembangnya ekosistem ekonomi digital di tingkat provinsi (Solomon & van Klyton, 2020).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperkuat fungsi sistem keuangan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah. Pemanfaatan teknologi digital meningkatkan efisiensi layanan perbankan, memperluas jangkauan intermediasi keuangan, serta mempermudah akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembiayaan formal (Satrya et al., 2025). Kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan penyaluran kredit perbankan ke sektor produktif, yang selanjutnya berkontribusi terhadap pembentukan nilai tambah ekonomi regional sebagaimana tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (Sandi et al., 2025).

Kredit perbankan merupakan instrumen intermediasi keuangan yang berfungsi menyalurkan dana kepada rumah tangga dan pelaku usaha untuk mendukung kegiatan produksi, investasi, dan pengembangan usaha (Saleem et al., 2024). Penyaluran kredit dapat meningkatkan kapasitas produksi, perluasan skala usaha, serta penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah (Kyengo et al., 2023). Peran tersebut menjadikan kredit perbankan sebagai salah satu determinan penting

dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku melalui penguatan aktivitas ekonomi sektor produktif.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan positif antara kredit perbankan dan PDRB. Menurut Ikhwani & Rusydiana (2024) menemukan bahwa kredit bank berperan signifikan dalam meningkatkan PDRB melalui alokasi pembiayaan investasi produktif yang mendorong optimalisasi kapasitas produksi. Temuan lain dari Parengkuan & Rahman (2024) yang menyoroti peran strategis pembiayaan UMKM dalam memperkuat aktivitas ekonomi lokal. Temuan tersebut menegaskan bahwa penyaluran kredit berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi di tingkat daerah.

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh kredit terhadap PDRB dapat bervariasi antarwilayah dan dipengaruhi oleh faktor pendukung ekonomi daerah. Menurut Dermawan et al., (2022) menemukan bahwa pembiayaan perbankan berpengaruh signifikan terhadap PDRB ketika didukung oleh tenaga kerja yang produktif, sementara Putri et al., (2023) menunjukkan peran dominan kredit bank konvensional dibandingkan pembiayaan syariah dalam meningkatkan PDRB provinsi. Variasi temuan tersebut mencerminkan dinamika penyaluran kredit perbankan di Indonesia, yang tercermin pada perkembangan penyaluran kredit selama periode 2020–2024 dengan kecenderungan fluktuatif dan meningkat seiring pemulihan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut.



Gambar 1.4 Grafik Penyaluran Kredit Bank Umum Konvensional di Indonesia, 2020–2024 (Miliar Rupiah).  
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Gambar 1.4, total kredit yang disalurkan meningkat dari sekitar Rp 5.481.560 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 7.827.148 miliar pada tahun 2024, mencerminkan cakupan dan distribusi pembiayaan perbankan di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Kenaikan ini didorong oleh permintaan modal kerja UMKM, dukungan kebijakan pemerintah, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi (BCA, 2025). Sementara itu, fluktuasi tingkat bunga dan keterbatasan kapasitas perbankan dapat menahan laju penyaluran di beberapa periode. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses kredit bank umum konvensional berperan penting dalam meningkatkan pendapatan dan PDRB atas dasar harga berlaku (Nurlaela et al., 2025).

Perkembangan sistem pembiayaan nasional tidak hanya ditopang oleh perbankan konvensional, tetapi juga diperkuat oleh inovasi keuangan berbasis teknologi. *Fintech lending* atau *peer-to-peer (P2P) lending* merupakan bentuk pembiayaan digital yang memungkinkan peminjaman dana secara langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui platform berbasis teknologi

informasi (Suryono et al., 2021). *Fintech lending* mulai berkembang pesat di Indonesia sekitar awal 2016, didorong oleh meningkatnya adopsi teknologi digital dan regulasi pendukung dari OJK (AFPI, 2024). Layanan ini menawarkan sejumlah keuntungan, antara lain akses modal yang lebih mudah bagi UMKM dan individu yang sebelumnya sulit memperoleh pembiayaan, kecepatan proses transaksi, serta fleksibilitas tanpa agunan (Yulianti et al., 2024).

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa *fintech lending* memiliki hubungan positif dengan peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku. Menurut Fisabilillah & Cindy (2022) menemukan bahwa P2P lending berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB Indonesia melalui peningkatan aktivitas ekonomi daerah dan pendapatan regional. Hasil penelitian dari Wahyono et al., (2022) menunjukkan bahwa peningkatan pinjaman *fintech* sebesar satu persen mampu meningkatkan PDRB provinsi sebesar 0,653 persen, meskipun besarnya dampak dipengaruhi oleh kondisi struktural daerah, seperti tingkat pengangguran dan ketimpangan ekonomi.

Temuan lain mengindikasikan bahwa kontribusi *fintech* terhadap PDRB bergantung pada integrasinya dalam ekosistem keuangan digital secara menyeluruh. Temuan dari Sutjiono & Leng (2024) menunjukkan bahwa uang elektronik berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, sementara P2P lending tidak signifikan secara parsial namun memberikan kontribusi secara simultan bersama instrumen *fintech* lainnya. Dukungan empiris terhadap

temuan tersebut tercermin pada grafik perkembangan penyaluran fintech lending selama periode 2020–2024 yang



Gambar 1. 5 Grafik Penyaluran Fintech lending 2020 – 2024 (Triliun Rp).

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan.

Data penyaluran menunjukkan akumulasi pinjaman fintech lending meningkat tajam, dari sekitar Rp150 triliun pada 2020 menjadi hampir Rp800 triliun pada 2024 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Peningkatan ini mencerminkan adopsi layanan fintech yang meluas, termasuk di daerah dengan keterbatasan akses perbankan konvensional. Fintech lending menawarkan alternatif pembiayaan yang semakin diminati karena fleksibilitas, kecepatan, dan kemudahan akses tanpa agunan. Pada 2023, layanan ini telah menjangkau 63% peminjam di luar Pulau Jawa (Rustan DM, 2025), memperluas inklusi keuangan melalui akses P2P lending, pembayaran digital, dan investasi online (Rizal et al., 2025).

Di balik kemudahan dan perluasan akses pembiayaan, fintech lending juga menghadapi sejumlah risiko dan tantangan. Salah satunya adalah risiko kredit, di mana peminjam berpotensi gagal membayar pinjaman karena keterbatasan

kemampuan finansial atau kurangnya literasi keuangan (Susanto, 2025). Selain itu, keamanan data dan perlindungan konsumen menjadi isu penting, mengingat seluruh transaksi dilakukan secara digital dan rentan terhadap penipuan atau kebocoran data.

Efektivitas *fintech lending* dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (Susanto, 2025). Selain itu, kontribusi pembiayaan digital terhadap PDRB atas dasar harga berlaku juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengarahkan aliran pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi produktif. Oleh karena itu, dukungan infrastruktur dan tata kelola regulasi yang memadai menjadi prasyarat penting bagi optimalisasi peran *fintech lending* dalam meningkatkan PDRB.

Keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah dapat mengurangi efektivitas pemanfaatan *fintech lending* dalam mendorong aktivitas ekonomi. Perkembangan regulasi juga menuntut penyelenggara *fintech* untuk memenuhi standar operasional dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Suryani, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan digital terhadap PDRB atas dasar harga berlaku bergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi, kepatuhan terhadap regulasi, serta kemampuan daerah dalam mengarahkan pembiayaan ke sektor ekonomi produktif. Pemanfaatan *fintech lending* yang didukung oleh infrastruktur memadai dan tata kelola regulasi yang efektif berpotensi memperkuat peningkatan PDRB daerah.

Akses pembiayaan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, sehingga jumlah penduduk yang bekerja bertambah. Penduduk bekerja mengacu pada penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan atau imbalan (Ahmaddizon & Aimon., 2020). Peningkatan jumlah tenaga kerja ini memperkuat kapasitas produksi daerah dan secara langsung memengaruhi PDRB atas dasar harga berlaku.

Sejumlah studi menegaskan bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menentukan PDRB daerah. Hasil studi Adinata Ariyadi & Nilasari (2025) menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB Pulau Jawa, menandakan bahwa peningkatan kapasitas dan keterlibatan tenaga kerja berdampak langsung pada pendapatan regional. Temuan lain dari Nuramalina et al., (2025) menambahkan bahwa kontribusi jumlah tenaga kerja terhadap PDRB akan lebih optimal jika tenaga kerja dimanfaatkan secara efektif, menekankan bahwa kualitas dan kuantitas tenaga kerja sama-sama menentukan pertumbuhan ekonomi daerah.

Temuan lainnya juga menunjukkan hubungan positif antara jumlah penduduk produktif dan pendapatan regional. Menurut Jamaludin et al., (2025) menemukan bahwa populasi yang produktif meningkatkan tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan ekonomi dan menurunkan pengangguran, sehingga berdampak pada PDRB. Hasil penelitian lain dari Sadid et al., (2024) menegaskan bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap PDRB, meskipun secara individual tidak selalu signifikan, namun secara keseluruhan

tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Grafik jumlah penduduk yang bekerja menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan kapasitas produksi yang terus bertambah dan kontribusi tenaga kerja yang semakin kuat terhadap PDRB.



Gambar 1. 6 Grafik Penduduk Yang Bekerja (Juta Jiwa) 2020 – 2024.  
Sumber : Badan Pusat Statistik

Jumlah penduduk pada tahun 2020, jumlah pekerja berada di kisaran 204 juta orang dan terus meningkat menjadi sekitar 207 juta orang pada 2021. Pertumbuhan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan jumlah pekerja mencapai kurang lebih 209 juta orang, kemudian naik lagi menjadi sekitar 212 juta orang pada 2023. Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang bekerja kembali meningkat hingga mencapai sekitar 215 juta orang. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa kapasitas tenaga kerja nasional semakin kuat dan kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi regional terus membesar (Badan Pusat Statistik, 2025).

Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja didorong oleh ekspansi sektor digital dan gig economy. Pertumbuhan UMKM melalui program pemerintah seperti KUR dan BLT UMKM, peningkatan tingkat pendidikan serta pelatihan

vokasi melalui Kartu Prakerja, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) rata-rata 6–8% per tahun, serta terciptanya lapangan kerja baru di sektor manufaktur (13,86%), perdagangan (18,73%), dan pertanian (28,15%) (Wajokab., 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya tenaga kerja produktif selain mampu mendorong kapasitas produksi, juga efektif membuka peluang kerja baru, yang berdampak langsung pada pendapatan, daya beli, dan kualitas hidup masyarakat (Sutrisno, 2021). Peningkatan partisipasi tenaga kerja produktif menjadi faktor penting dalam memperkuat kinerja ekonomi daerah, terutama didukung oleh akses pembiayaan yang inklusif dan kemajuan teknologi digital yang mampu memperluas aktivitas ekonomi masyarakat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akses keuangan digital, termasuk kredit perbankan dan pinjaman fintech, berpengaruh terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Namun, sebagian studi masih menelaah variabel ini secara terpisah atau terbatas pada wilayah dan periode tertentu, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak simultan keuangan digital terhadap PDRB di tingkat provinsi. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menggabungkan kredit bank umum konvensional dan fintech lending dalam satu model analisis untuk mengevaluasi pengaruhnya secara simultan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di 32 provinsi di Indonesia selama periode 2024.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur mengenai keuangan digital dan pertumbuhan ekonomi regional di negara berkembang, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi

kebijakan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan peran kredit bank umum konvensional dan fintech lending untuk meningkatkan PDRB secara merata dan berkelanjutan di seluruh provinsi. Tren data PDRB dan jumlah penduduk yang bekerja dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang konsisten, menegaskan pentingnya strategi integrasi keuangan digital untuk memperkuat kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia terus menunjukkan peningkatan nilai setiap tahunnya, mencerminkan besarnya kontribusi ekonomi nasional. Distribusi PDRB antar provinsi tetap menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Pada tahun 2024, DKI Jakarta mencatat PDRB tertinggi sebesar Rp 3.679.359 miliar, sedangkan Maluku memiliki PDRB terendah sebesar Rp 62.646 miliar. Selisih antara kedua provinsi tersebut mencapai Rp 3.616.713 miliar, menandakan kesenjangan ekonomi yang lebar antarwilayah. Ketidakseimbangan capaian ekonomi antar provinsi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan pada faktor-faktor determinan PDRB. Variabel seperti fintech lending, penyaluran kredit perbankan, tingkat adopsi teknologi digital, dan jumlah penduduk yang bekerja diduga memiliki peran strategis dalam menentukan nilai PDRB di setiap provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap PDRB provinsi di Indonesia, yang kemudian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh adopsi teknologi terhadap Produk Domestik Regional Bruto?
2. Bagaimana pengaruh kredit bank umum konvensional terhadap Produk Domestik Regional Bruto?
3. Bagaimana pengaruh *fintech lending* terhadap Produk Domestik Regional Bruto?
4. Bagaimana pengaruh Penduduk yang bekerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keuangan digital dan penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh adopsi teknologi terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
2. Untuk menganalisis pengaruh bank umum konvensional terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
3. Untuk mengetahui pengaruh *fintech lending* terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
4. Untuk menganalisis pengaruh Penduduk yang bekerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pengaruh fintech lending, kredit perbankan, dan jumlah penduduk yang bekerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia.

#### 2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan bagi pembaca mengenai peran sektor keuangan dan tenaga kerja dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia.

#### 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan acuan dalam pengembangan kajian ilmiah di bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi regional, khususnya yang berkaitan dengan sektor keuangan, tenaga kerja, dan Produk Domestik Regional Bruto.

#### 4. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto melalui penguatan sektor keuangan dan perluasan kesempatan kerja.

### 1.5 Sistematika Bab

Secara garis besar penulisan penelitian ini direncanakan akan dibagi menjadi lima bagian yang terdiri dari :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang menjadi dasar perumusan masalah. Kondisi empiris yang melatarbelakangi penelitian, urgensi topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar konseptual penelitian. Pembahasan meliputi teori terkait Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi regional, serta konsep kredit perbankan, fintech lending, teknologi digital, dan tenaga kerja dalam kaitannya dengan kinerja ekonomi daerah. Bab ini juga menyajikan kerangka pemikiran konseptual dan perumusan hipotesis penelitian.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta definisi operasional variabel dependen dan independen. Penelitian ini menggunakan data *cross-sectiona* selama satu tahun dari 32 wilayah, dengan prosedur analisis data, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis dijelaskan secara sistematis untuk memastikan validitas dan keandalan hasil penelitian.

#### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan secara umum tentang data penelitian berupa data cross-sectional satu tahun dari 32 wilayah, lengkap dengan statistik deskriptif variabel dependen dan independen. Analisis dilakukan menggunakan regresi OLS untuk menilai pengaruh kredit perbankan, fintech lending, teknologi digital, dan tenaga kerja terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Uji asumsi klasik yang relevan, meliputi normalitas residual, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan Autokorelasi, dilakukan untuk memastikan validitas dan keandalan hasil regresi. Hasil regresi dibahas dengan mengaitkan temuan empiris pada teori dan penelitian terdahulu, serta menafsirkan kontribusi masing-masing variabel terhadap PDRB.

#### BAB V KESIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, implikasi kebijakan, keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.